

Konflik Internal dalam Hubungan Internasional Menyoal Konflik antara Pemerintah Spanyol dengan Catalonia

Windy Dermawan^{1*}, Fakhri Sabiq Muawal², Henike Primawanti³

¹⁻²Universitas Padjadjaran, Indonesia

³Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Article Info:

Submitted: 1 Oktober 2023	Accepted: 24 Oktober 2023	Approve: 27 Oktober 2023	Published: 31 Oktober 2023
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Correspondence Author:

Windy Dermawan,
Universitas Padjadjaran, Indonesia.
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21,
Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363

Email: windydermawan@gmail.com

Abstrak. Konflik antara Pemerintah Spanyol dan Catalonia merupakan sebuah konflik yang sudah terjadi selama lebih dari 2 dekade. Dimana konflik tersebut melibatkan Pemerintah Pusat Spanyol dengan Pemerintah Regional dan kelompok separatistis di Catalonia. Faktor sejarah, budaya, dan ekonomi menjadi latar belakang dari terjadinya konflik ini. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis resolusi konflik antara Spanyol dengan Catalonia dengan menggunakan teori resolusi konflik dan *game theory*. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Artikel ini menemukan bahwa dipergunakannya pendekatan yang berbeda oleh Pemerintah Spanyol dalam meredakan konflik yang terjadi. Dalam meredakan konflik di Catalonia, pendekatan yang dilakukan dengan menggalang dukungan internasional untuk mendorong Pemerintah Spanyol mengadakan kesepakatan tertentu. Selain itu, Catalonia tidak perlu melakukan dorongan atas tindakan separatisme dengan mendirikan negara sendiri. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi pergerakan Catalonia itu sendiri apalagi ketika Catalonia tidak mendapatkan dukungan internasional. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi dan pembuatan semacam nota kesepahaman yang berisi jalan tengah dari kedua belah pihak agar konflik tersebut dapat diselesaikan dan penyelesaian konflik tersebut dapat berlangsung lama.

Kata Kunci: Catalonia, Spanyol, Resolusi Konflik, Konflik Internal, Hubungan Internasional.

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Catalonia merupakan salah satu daerah otonom negara bagian Spanyol. Catalonia merupakan sebuah wilayah yang cukup strategis dengan memiliki iklim yang hangat serta berdekatan dengan laut mediterania dan negara Prancis. Karakter wilayah dari Catalonia cukup beragam seperti adanya lembah, daratan yang terhampar luas, serta pegunungan tinggi sejauh 3.000 meter bernama Pegunungan Pyrenees menjadi daya tarik bagi wilayah ini. Selain itu, Wilayah Catalonia juga memiliki Sungai dan kekayaan alam yang cukup melimpah. Tak mengherankan apabila Wilayah Catalonia merupakan wilayah yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara dengan jumlah

besar setiap tahunnya. Oleh karena itu, sektor pariwisata merupakan bagian penting dari perekonomian Catalonia. Tak hanya itu, selain sektor pariwisata, Catalonia juga memiliki bagian penting lainnya dalam peningkatan ekonomi wilayah tersebut. Salah satunya adalah manufaktur dan logam. Catalonia juga memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang menciptakan sektor industri yang kompetitif sehingga bisa mendorong perekonomian Catalonia. Perekonomian Catalonia sendiri pada tahun 2018 mencapai 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Spanyol. Jika menilik dari sejarah, Wilayah Catalonia sudah tercatat ada pada abad ke 9 dan menjadi wilayah yang strategis bagi perdagangan di wilayah sekitar mediterania pada abad ke 12. Pada abad ke 15, Wilayah Catalonia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aragon. Bangsa Catalonia sejak dulu memiliki kaitan yang erat dengan sektor ekonomi dan demografi. Catalonia digambarkan sejak dulu sebagai wilayah yang makmur dengan industri dan perdagangan yang maju dan memiliki kekayaan pada bidang kesenian dan sastra. Bangsa Catalonia juga dikenal memiliki bahasa, budaya, dan kesenian yang berbeda dengan Spanyol (Tzagkas, 2018).

Wilayah Catalonia dikenal berbeda dengan wilayah Spanyol lainnya. Catalonia memiliki bahasa, budaya, kesenian, sastra dan hasil peradaban lainnya yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Spanyol. Masyarakat Catalan saat ini merasakan bahwa diri mereka jelas berbeda dengan masyarakat Spanyol. Perbedaan-perbedaan inilah yang sejak dahulu mendorong masyarakat Catalonia untuk selalu berpisah dari entitas yang menaungi mereka. Bahkan, ide untuk membentuk negara tersendiri juga bukan merupakan ide kemarin sore melainkan sebuah ide yang sudah dibicarakan sejak lama oleh masyarakat Catalonia dari generasi ke generasi. Sebagian besar masyarakat Catalan merasa diri mereka sebagai sebuah entitas yang eksklusif dan tak ingin disamakan dengan masyarakat Spanyol. Hal tersebut yang membuat seseorang yang lahir dan besar di Catalonia serta berbicara menggunakan bahasa Catalan sebagai bahasa pengantar sehari-hari cenderung lebih menginginkan adanya rasa kemerdekaan dan melepaskan diri dari Spanyol. Sebuah studi menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi dan sosio-kultural sangat berpengaruh dalam gerakan separatisme yang mendorong ke arah terjadinya konflik. Selain tempat kelahiran dan bahasa, faktor ekonomi, tempat asal keluarga, bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya, ideologi, kelas sosial dan pendidikan sangat berpengaruh bagi warga Catalonia dalam upayanya melakukan gerakan separatisme yang mendorong terjadinya konflik dengan Pemerintah Spanyol (Miley & Garvia, 2019).

Berdasarkan perbedaan-perbedaan serta unsur sosio-kultural tersebutlah dorongan untuk gerakan kemerdekaan terus digaungkan sejak lama. Namun, tak hanya masalah sosio-kultural saja, faktor masa lalu juga menjadi salah satu faktor penting mengapa perlawanan masyarakat Catalonia begitu kuat. Hal tersebut terjadi ketika masa pemerintahan Jenderal Francisco Franco yang menciptakan kebijakan ultranasionalisme yang sangat mendorong adanya persatuan Spanyol dan hanya menciptakan satu identitas Spanyol saja. Kebijakan yang dilakukan sangat bertindak koersif, represif, serta memiliki unsur-unsur pemaksaan terhadap seluruh entitas yang ada di Spanyol. Kebijakan tersebut seperti hukuman mati terhadap para pendukung partai sayap kiri dan orang-orang yang mendukung adanya Republik Spanyol. Kebijakan lain adalah adanya larangan penggunaan bahasa Catalan, larangan pemberian nama yang berbau unsur Catalan untuk anak-anak, serta menciptakan tim mata-mata khusus yang mengawasi setiap gerak warga Catalan. Hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh Warga Catalan. Kebijakan tersebut dianggap sebagai serangan ofensif terhadap kebudayaan serta identitas mereka. Dengan begitu masifnya upaya Jenderal Franco menerapkan kebijakan ultra nasionalismenya tersebut, membuat masyarakat Catalonia pun semakin bersemangat untuk menyuarakan keinginan mereka untuk melepaskan diri dari Spanyol. Berbagai

penindasan serta ketimpangan keberpihakan pemerintah sentral Spanyol serta pengaruh ekonomi serta sosio kultural masyarakat Catalan menjadi pendorong adanya keinginan untuk merdeka dari Spanyol dimana hal tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya konflik antara Spanyol dengan Catalonia (Adhinata, 2018).

Tulisan ini memfokuskan pembahasan dalam melakukan riset terhadap upaya resolusi konflik secara menyeluruh mengenai konflik internal yang terjadi antara Pemerintah Spanyol dan Catalonia. Dalam upaya melakukan riset lebih dalam mengenai pembahasan mengenai konflik antara Spanyol dan Catalonia, Periset telah menemukan beberapa riset sebelumnya. Berdasarkan artikel jurnal (Dermawan & Akim, 2020) menekankan bahwa upaya yang ditempuh Pemerintah Catalonia dalam penyelesaian konflik serta meraih kemerdekaan dari Spanyol dilakukan melalui paradiplomasi. Dalam riset tersebut, dijabarkan mengenai bagaimana paradiplomasi sebagai sebuah unsur hubungan luar negeri yang dilakukan oleh *sub-state actor* dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Catalonia berpengaruh terhadap upaya mereka melakukan resolusi konflik serta meraih kemerdekaan dari Pemerintah Spanyol. Hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Catalonia antara lain adalah mengirim perwakilan untuk berbicara di forum Uni Eropa serta turut aktif dalam berbagai kegiatan regional eropa seperti *Association of European Border Regions* dan *Conference of Regions With Legislative Power*. Berbagai upaya paradiplomasi tersebut adalah upaya dari Pemerintah Catalonia untuk meraih tujuan utama mereka yaitu kemerdekaan atas Spanyol. Selain itu, dalam artikel jurnal (Holesch & Jordana, 2021) menekankan mengenai peran Uni Eropa dalam membantu penyelesaian konflik antara Spanyol dan Catalonia. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa Uni Eropa memainkan peran penting sebagai wadah bagi Pemerintah Spanyol untuk melakukan diplomasinya dalam upaya menghentikan upaya pemisahan diri dari Pemerintah Catalonia. Dalam artikel tersebut juga diungkapkan bahwa Uni Eropa juga menjadi pemain penting dalam upaya peredaman konflik dengan menjaga status quo dari Pemerintah Spanyol dengan mendukung penuh Spanyol dimana mayoritas negara anggota juga enggan mengakui hasil referendum yang dilakukan oleh Catalonia. Dalam artikel jurnal (Anderson, 2020) menekankan mengenai bagaimana pengaruh kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol mempengaruhi gelombang separatisme di Catalonia. Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa terdapat kebijakan yang kurang mengakomodasi keinginan masyarakat Catalonia sehingga terciptalah masalah sosial yang mengarah kepada konflik dan berujung kepada aksi separatisme. Kemudian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh (Esteller-Moré & Rizzo, 2021) membahas mengenai efek ekonomi yang terjadi akibat konflik antara Spanyol dan Catalonia dimana menurut artikel tersebut terdapat data yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah uang maupun investasi yang keluar dari wilayah Catalonia akibat terjadinya konflik tersebut.

Berdasarkan paparan mengenai berbagai riset yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat sebuah jenjang penelitian yaitu belum adanya riset yang membahas mengenai resolusi konflik yang terjadi antara Spanyol dan Catalonia secara menyeluruh. Dalam riset ini, terdapat pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana resolusi konflik antara Pemerintah Spanyol dengan Pemerintah Catalonia?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Konflik yang terjadi antara Pemerintah Spanyol dengan Pemerintah dan Masyarakat Catalonia, mengetahui resolusi konflik atas konflik Spanyol dengan Catalonia dan mengetahui implementasi resolusi konflik di Spanyol dan komparasi terhadap konflik di Indonesia. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai wujud implementasi dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi. Selain itu, bagi masyarakat luas, tulisan ini dapat

memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai Resolusi Konflik Spanyol dan Catalonia. Kemudian, bagi pemerintah, tulisan ini bermanfaat dalam memberikan masukan kebijakan di masa yang akan datang perihal mengelola konflik internal di negara yang multikultural seperti di Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Resolusi Konflik

Resolusi Konflik merupakan sebuah pemikiran dalam Hubungan Internasional mengenai berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Umumnya, resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik dengan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Akan tetapi, lebih daripada itu, resolusi konflik merupakan sebuah cara yang diterapkan pada semua konflik yang ada dengan mencakup cara-cara konstruktif yang mengubah konflik menjadi sebuah hubungan yang adil antar pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan konflik tersebut. konsepsi dan pemikiran dari resolusi konflik sangatlah luas dan sudah sangat berkembang. Pada dasarnya, konsep resolusi konflik tidak hanya dapat digunakan untuk penyelesaian masalah pada level negara, akan tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai perkumpulan sosial seperti komunitas, organisasi, bahkan keluarga. Konsepsi resolusi konflik dalam Studi Hubungan Internasional seringkali merujuk pada arena konflik atau tahap konflik tertentu namun belum terdapat sebuah konsensus utuh mengenai sebuah teori komprehensif mengenai konflik sosial dan penyelesaiannya. Namun, para ahli berpendapat bahwa meski belum ada konsensus utuh, terdapat kesepakatan umum bahwa konflik dapat dikelola lebih baik dan dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan konsepsi konstruktif untuk menciptakan perdamaian dan dunia yang lebih harmonis (Bercovitch, Kremenyuk, & Zartman, 2008).

Dalam melakukan Resolusi Konflik, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Tahap paling sederhana dan paling penting dalam upaya resolusi konflik adalah perlindungan terhadap hak-hak bagi pihak-pihak yang berkonflik. Hal tersebut merupakan hal paling penting agar pihak-pihak yang sedang berkonflik sama-sama dihargai dan tidak adanya ketimpangan kekuatan dalam proses resolusi konflik. Resolusi konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah upaya menciptakan konsensus antara dua pihak untuk mencapai keuntungan bersama. Negosiasi dalam prakteknya mencoba untuk melakukan perencanaan awal disertai dengan pengembangan negosiasi dan pertukaran informasi antara kedua belah pihak. Diskusi pra negosiasi umumnya bersifat informal yang mengarah pada tawar-menawar langsung yang dirancang untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Setelah melakukan diskusi, langkah berikutnya adalah melakukan klarifikasi yang dilanjutkan dengan pengusulan draf perjanjian untuk penyelesaian masalah, tahap tawar-menawar, kompromi, dan mencapai kesepakatan. Selain negosiasi, terdapat pula mediasi, mediasi merupakan sebuah diplomasi perdamaian model baru. Hal tersebut dikarenakan dalam bentuk mediasi, terdapat pihak ketiga dalam mencapai penyelesaian konflik. Secara teoritis, pihak ketiga tersebut berposisi sama dengan pihak yang berkonflik dan berpihak "netral" untuk membantu menyelesaikan konflik. Dalam dunia internasional, mediasi telah digunakan untuk mengakhiri perang seperti di Burundi, Sudan, Bosnia-Herzegovina dan Irlandia Utara. Dalam proses resolusi konflik juga terdapat rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan sebuah proses pemulihan keadaan setelah terjadinya konflik. Resolusi konflik juga seringkali dianggap proses "penyembuhan" setelah terjadinya konflik diantara pihak-pihak yang bertikai. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk membangun hubungan baru seiring dengan upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang belum selesai. Rekonsiliasi juga berkaitan dengan upaya

memelihara sikap, nilai, dan kapasitas untuk saling menghormati dan saling bekerjasama. Inti dari rekonsiliasi adalah untuk mengembalikan keadaan damai serta terjalinnya hubungan yang harmonis antar pihak-pihak yang baru saja menyelesaikan konflik. Dalam aspek ini, tentu saja aspek-aspek psikologis sangat diutamakan, hal tersebut demi terciptanya hubungan yang demokratis, penuh konsensus dan dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur dan struktur yang telah disepakati bersama (Jeong, 2010).

2.2 Game Theory

Game Theory merupakan sebuah teori yang menggunakan pendekatan baru dalam upaya menyelesaikan konflik dan persaingan. Game Theory pada umumnya digunakan pada masalah-masalah bisnis. Namun, seiring dengan perkembangan situasi yang terjadi, Game Theory kini sudah masuk kedalam pembahasan mengenai Hubungan Internasional. Pemikiran mengenai Game Theory lahir dari sebuah gagasan bahwa konflik maupun persaingan bukanlah sebuah "Zero Sum Game". Inti dari Game Theory adalah bagaimana upaya untuk mencari sebuah "Equilibrium" atau keseimbangan dalam konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi tak hanya soal menang kalah, tapi juga bisa saja terdapat situasi dimana semuanya menang dan juga bisa semuanya kalah. Semua hal tersebut bergantung dari dinamika konflik dan bagaimana equilibrium ataupun keseimbangan dalam konflik tersebut dapat tercipta (Binmore, 2007).

Selama terjadinya perang dingin, peran Game Theory sebagai alat untuk menganalisis konflik dikembangkan untuk menangani masalah yang terjadi antara Blok Timur dan Blok Barat. Game Theory dapat digunakan untuk menggambarkan bahaya yang melekat saat terjadinya konflik maupun peperangan. Selain itu, Game Theory juga dapat digunakan untuk mempertajam strategi bagi suatu negara yang menggunakannya. Teori ini juga dapat digunakan untuk studi resolusi konflik. Teori ini juga dikatakan mampu untuk menganalisis tiga kekuatan besar selama Perang Dingin yaitu Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam upaya memetakan kekuatan dari ketiga negara tersebut untuk mencapai sebuah resolusi konflik. Selain dalam menganalisis perang dingin, teori ini juga seringkali digunakan dalam studi resolusi konflik dalam upaya memfokuskan diri dalam memetakan eskalasi, polarisasi, dan bagaimana cara untuk mengelola sebuah konflik yang terjadi. Selain itu, berbagai variabel lain seperti halnya bagaimana suatu pihak berpotensi menjadi sekutu atau pun menjadi musuh juga dapat dilihat melalui teori tersebut. Game Theory juga menekankan pada bagaimana dinamika konflik yang terjadi (Wallenstein, 2002). Dalam (Rapoport, 1974) menekankan bahwa asal usul Game Theory berakar pada konflik atau permusuhan 2 pihak atau lebih yang berlaku secara konstan dimana hal tersebut sulit untuk didamaikan. Keterampilan dalam upaya resolusi konflik dalam hal tersebut bergantung bagaimana kapasitas seseorang dapat menemukan sebuah strategi yang baik yang mengarah kepada keuntungan pada pihaknya atau pun resolusi konflik bagi kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Teori ini secara sederhana menjelaskan bahwa setiap permainan dengan jumlah konstan memiliki setidaknya satu strategi yang bersifat optimal dan satu strategi yang bersifat campuran. Seorang pemain atau aktor yang bermain dengan memilih suatu strategi tertentu akan mendapatkan hasil tertentu. Oleh karena itu, dengan jumlah pemain yang konstan, hal tersebut dapat berarti bahwa setiap pemain dapat mempertahankan posisi kekurangan maupun kelebihan pihak lainnya sehingga dalam permainan tersebut tercipta suatu posisi keseimbangan. Artinya, jika satu aktor memainkan strategi optimal, maka pemain lain tidak dapat memiliki hasil yang optimal. Begitu pula terjadi yang sebaliknya. Hal tersebut juga dapat tergambar bahwa jika semua pemain memainkan strategi yang optimal, maka semuanya bersifat setara dalam arti bahwa kemenangan

dapat dimiliki secara bersama-sama. Maka, dalam teori ini menghasilkan suatu keseimbangan. Inti dari teori ini adalah bagaimana kekuatan-kekuatan para aktor yang berkonflik dapat mencapai suatu titik keseimbangan yang bisa mengarah kepada penyelesaian atau resolusi konflik.

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut dapat dipahami melalui wawancara maupun melakukan penelusuran melalui studi pustaka (Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2009). Penelitian kualitatif berorientasi induktif dan generalisasi pada teori. Orientasi epistemologis pada penelitian kualitatif juga menggunakan interpretivisme. Penelitian kualitatif bisa juga dikatakan sebagai strategi penelitian yang menekankan penjelasan dari kata-kata ketimbang dari penghitungan. Penelitian kualitatif menekankan pada pendekatan induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian, menolak praktik dan metode ilmu pengetahuan alam serta positivisme serta melihat realitas sosial sebagai sebuah hal yang akan terus menerus muncul dan melihat hal tersebut sebagai ciptaan individu (Bryman, 2012).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder sumber data sekunder dimana data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012). Berbeda dengan sumber data primer, dalam praktiknya para peneliti yang menggunakan sumber data sekunder dapat mengeksplorasi lebih jauh terkait penelitian yang sedang diteliti tanpa harus melalui proses pengumpulan data yang menyita waktu banyak. Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan terkait tingkat presisi sumber data sekunder yang mampu mendukung suatu penelitian, antara lain: kemampuan data untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian, kesesuaian antara periode waktu penelitian dengan ketersediaan sumber data, dan relevansi atau tingkat keakuratan sumber data yang digunakan (Purhantara, 2010).

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka dalam pengumpulan data dipahami sebagai metode atau teknik pengumpulan data melalui proses pengambilan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian, dari sumber sumber berupa buku, ataupun artikel-artikel dalam jurnal ilmiah (Nazir, 2014). Secara umum, pada pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dalam penelitian ini, juga digunakan sumber-sumber literatur seperti berita dan publikasi di situs resmi pemerintah, yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Berkaitan dengan validitas dan realibilitas data, validitas yang dilakukan oleh penelitian kualitatif tentu berbeda dengan validitas yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, validitas berarti bahwa seorang peneliti perlu melakukan serangkaian pemeriksaan untuk melihat akurasi dari data yang didapatkan. Validitas yang dimaksud dalam penelitian kualitatif juga merupakan salah satu kekuatan dalam penelitian kualitatif dan berdasar pada upaya peneliti memastikan akurasi dari hasil yang telah diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu merupakan upaya pencarian data dari berbagai sumber agar dapat memastikan kebenaran serta akurasi dari data yang didapatkan. Selain itu, dalam hal reliabilitas, dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya dari para peneliti untuk memastikan bahwa pendekatan penelitian yang mereka lakukan memiliki reliabilitas. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan

melakukan pemeriksaan terhadap transkrip, kode, dan lain sebagainya agar tidak terjadi kesalahan dari peneliti (Creswell & Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: Fifth Edition, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konflik Antara Pemerintah Spanyol dan Catalonia

Seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan dari artikel ini, Konflik antara Spanyol dan Catalonia bukanlah merupakan konflik yang baru berumur 1 atau 2 tahun melainkan sebuah konflik yang bahkan usianya lebih dari 2 dekade. Konflik tersebut memiliki latar belakang sejumlah faktor seperti halnya masalah sejarah, sosial, budaya, hingga ekonomi. Pasca kembalinya Spanyol menjadi negara yang lebih demokratis setelah lepas dari diktator Fransisco Franco, Catalonia berkeinginan untuk meraih kewenangan otonomi yang lebih luas dari sebelumnya. Hal tersebutlah yang mendorong terjadinya referendum pada tahun 2006 yang menjadi salah satu bahasan utama konflik yang terjadi antara Pemerintah Spanyol dengan Catalonia. Sejak awal tahun 2000an, ketidakpuasan terhadap Pemerintah Spanyol mulai tumbuh di Catalonia dikarenakan masyarakat saat itu merasa ketimpangan sosial serta perbedaan yang semakin nyata diantara kedua entitas tersebut. Ketidakpuasan yang berkembang dikalangan masyarakat Catalonia juga berkembang akibat masalah-masalah kompleks di masa lalu yang tidak dapat ditangani dengan baik sehingga masalah terus terjadi hingga saat ini. Ketidakpuasan dari masyarakat itu pun pada akhirnya tertuang dalam sejumlah protes dan suara dari masyarakat Catalonia yang menginginkan adanya kemerdekaan. Seperti terlihat pada tahun 2006, kelompok pro kemerdekaan Catalonia mendapatkan dukungan yang besar oleh masyarakat serta demonstrasi yang cukup besar terjadi di Catalonia untuk mendorong adanya hak-hak politik yang lebih luas. Pada tahun 2006 tersebut dilakukan penyebaran pemikiran serta mobilisasi massa yang cukup kuat terutama di lapisan bawah masyarakat untuk mengarah kepada gerakan pro kemerdekaan. Gerakan pro kemerdekaan tersebut juga menyelipkan mengenai adanya dendam dan ketidakpuasan terhadap Pemerintah Spanyol di Madrid. Masyarakat Catalonia bersuara lantang untuk menegakkan demokrasi dan menuntut hak-hak otonomi yang lebih luas serta keinginan untuk menjadi negara otonom (Miro, 2020).

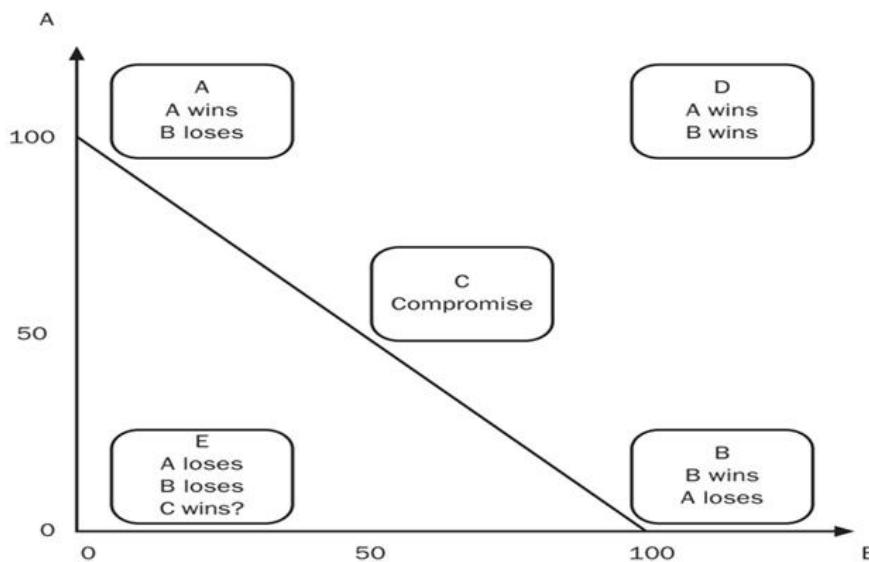
Dalam proses konflik yang terjadi pada tahun 2006, masyarakat Catalonia mendorong adanya otonomi yang lebih luas bagi Catalonia seperti halnya pendefinisian Catalonia sebagai sebuah bangsa dimana didalamnya terdapat kebebasan untuk menentukan nasib bagi diri mereka sendiri. Masyarakat Catalonia mendorong adanya kebijakan *self determination* tersebut lantaran mereka berkeinginan untuk mendapatkan kebebasan dalam menentukan hak politik mereka serta hak-hak politik lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Catalonia pun menuntut adanya kewenangan yang lebih besar bagi mereka untuk mengelola pendapatan pajak mereka serta berhak untuk membentuk sebuah pemerintah daerah yang otonom dengan sistem desentralisasi serta ditegakkannya hak *self determination* bagi masyarakat Catalonia (Irene & Mansur, 2019). Pada akhirnya, referendum pada tahun 2006 pun dilakukan dimana hasilnya merupakan amandemen dari konstitusi Spanyol sebelumnya. Setelah mengalami berbagai perdebatan yang cukup panjang di level regional maupun nasional, Pemerintah Spanyol pada akhirnya menyetujui ajuan perubahan otonomi Catalonia tersebut dimana hasil dari perubahannya juga memberikan kekuatan yang sangat luas pada Catalonia untuk mengatur undang-undang, budaya, bahasa, pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, dan perdagangan serta memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan hubungan luar negeri (Oner, 2019).

Setelah konflik yang terjadi pada tahun 2006 berujung pada perubahan konstitusi dari negara Spanyol, tak selesai sampai disitu, pembahasan mengenai apakah seharusnya Catalonia dapat menjadi negara independen terus bergulir. Wacana tersebut terus digaungkan oleh para pejuang kemerdekaan Catalonia. Puncaknya adalah sebuah peristiwa referendum pada tahun 2017. Pada 1 Oktober 2017, Pemerintahan Catalonia menyelenggarakan sebuah referendum kemerdekaan dimana para pemilih diberikan pertanyaan “Apakah anda menginginkan Catalonia menjadi negara independen dengan bentuk republik?” berdasarkan pertanyaan tersebut, pemilih diberikan 2 opsi pilihan yaitu “Ya” dan “Tidak”. Hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa 90% mengatakan “Ya” sedangkan 7% mengatakan “Tidak” dan sisanya merupakan suara yang tidak sah. Meskipun demikian, tingkat partisipasi dari pemilih tersebut hanya mencapai 43% saja. Referendum tersebut juga mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah pusat Spanyol. Hal tersebut ditunjukkan oleh partai pemerintah yang berkuasa di Spanyol yaitu Partido Popular dan sejumlah partai lainnya mengatakan bahwa referendum kemerdekaan Catalonia merupakan sebuah hal yang inkonstitusional. Referendum tersebut menyulut terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparat serta antara pejabat tinggi Catalonia dengan pejabat tinggi di Pemerintahan Pusat Spanyol. Konflik tersebut juga memicu terjadinya kerusuhan yang terjadi di Wilayah Catalonia (Cetra, Adam, & Tarrega, 2018). Pertentangan pun juga tak hanya terjadi di dalam negeri, melainkan terjadi pula di luar negeri. Uni Eropa sebagai sebuah institusi dan sejumlah negara anggota didalamnya juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Catalonia terhadap referendum tersebut merupakan sebuah tindakan yang ilegal dan melanggar konstitusi negara Spanyol (Dearden, 2017). Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga secara tegas menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh negara Spanyol dan tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia (Antara News, 2017). Kurangnya rekognisi dan dukungan dari negara maupun organisasi internasional lain juga semakin menyulitkan posisi Catalonia yang ditambah dengan kondisi di wilayah tersebut dimana konflik semakin berkecamuk.

4.2 Resolusi Konflik antara Pemerintah Spanyol dan Catalonia

Dalam melakukan resolusi konflik atas apa yang terjadi diantara konflik Pemerintah Spanyol dengan Catalonia, Pemerintah Spanyol melakukan resolusi konflik dengan melakukan dua pendekatan yang berbeda. Pada tahun 2006, Pemerintah Spanyol melakukan pendekatan dengan melihat kepada dinamika konflik. Dalam (Wallensteen, 2002) dijelaskan bahwa *Focusing on Conflict Dynamics* diartikan sebagai sebuah pendekatan dimana aktor memantau apa yang dilakukan oleh aktor lainnya dan bereaksi atas tindakan yang dibuat oleh aktor lain. Teknik ini juga dinilai sebagai teknik bercermin dimana pihak satu dan pihak lainnya saling menunggu dan memantau apa yang dilakukan oleh pihak lain. Dinamika konflik juga dapat dilihat dari polarisasi, sentralisasi, proteksi. Polarisasi merupakan bagaimana sebuah konflik menghasilkan dinamika terdapat dua kelompok atau lebih yang berseteru. Dalam hal ini, Pemerintah Spanyol menempatkan diri berada di seberang kubu Pemerintah dan Masyarakat Catalonia. Sementara, sentralisasi memiliki arti dimana pihak-pihak yang berkonflik saling memiliki kepemimpinan yang kuat untuk memimpin pihak-pihak tersebut dalam menghadapi dinamika konflik. Dalam kasus ini, Pemerintah Spanyol dipimpin oleh Perdana Menteri bersama kabinetnya berupaya untuk melawan pihak Catalonia yang dipimpin oleh Presiden Catalonia. Dinamika konflik yang terjadi juga membuat adanya proteksi yaitu penunjukkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam menghadapi konflik yang terjadi.

Ketika membahas mengenai dinamika konflik yang terjadi, maka *Game Theory* perlu digunakan dalam menganalisis masalah ini. Terlihat dari masalah yang terjadi dimana Pihak Spanyol masih ingin mempertahankan status quo dimana tetap mempertahankan Catalonia sebagai sebuah wilayah otonom dengan otonomi yang terbatas sementara pihak Catalonia menginginkan adanya perluasan otonomi maka terjadi perbedaan kepentingan dan keinginan yang terdapat diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini, *game theory* berupaya menjelaskan mengenai berbagai dinamika konflik hingga mencapai resolusinya. Adapun model game teori ini seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.



Gambar 1. Model Game Theory

Gambar 1 di atas merupakan sebuah model dari *game theory* yang juga dibahas oleh Galtung. Terdapat beberapa cara dalam menghadapi dinamika konflik hingga mencapai resolusinya dimana terdapat pihak A yang menang, Pihak B yang menang, atau terdapat kompromi dan bahkan bisa saja terdapat situasi dimana kedua belah pihak sama-sama kalah atau tidak diuntungkan dari hasil resolusi tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Spanyol sadar betul bahwa dukungan dan dorongan untuk melakukan amandemen terhadap kekuasaan otonomi Catalonia sangatlah besar. Oleh karena itu, pada akhirnya Pemerintah Spanyol menyetujui bahasan tersebut untuk dibawa ke parlemen dan pada akhirnya disetujui oleh parlemen pada 2007 yang berisikan mengenai perubahan serta perluasan otonomi Catalonia yang berisikan mengenai kewenangan pengelolaan pajak yang lebih besar, kebijakan imigrasi, penggunaan bahasa catalan, dan Wilayah Catalonia yang didefinisikan sebagai *nation*.

Kemudian dalam proses resolusi konflik pada 2017, Pemerintah Spanyol menggunakan teknik “penghitungan rasional” yaitu sebuah teknik pendekatan dalam resolusi konflik yang menggunakan perhitungan dengan memperhatikan apa yang musuh miliki dan apa yang musuh sudah lakukan. Dalam pendekatan ini aktor didorong untuk berpikir secara rasional dengan membentuk penilaian mereka sendiri dimana dari pemikiran tersebut akan tercapai sebuah keputusan maupun strategi untuk menghadapi konflik yang sedang terjadi. Dalam perspektif ini, mengakhiri sebuah konflik bukanlah satu-satunya kepentingan aktor. Aktor cenderung melihat kekuatan musuh dan justru bisa saja mengarah kepada penghancuran kelompok musuh apabila aktor merasa musuh mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Dalam perspektif ini, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah

konfrontasi. Dalam perspektif ini, menyerang pihak musuh juga bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk melindungi diri dari pihak lawan. Perspektif ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu dapat dihitung secara “untung-rugi” sehingga perlu pemikiran rasional dalam menghadapi konflik (Wallensteen, 2002).

Dalam hal resolusi konflik yang dilakukan oleh Spanyol dan Catalonia, pihak pemerintah Spanyol mengetahui bahwa hasil referendum tersebut memang 90% untuk kemerdekaan Catalonia. Akan tetapi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, referendum tersebut hanya diikuti oleh 43% warganya saja. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Spanyol melakukan kalkulasi bahwa tidak semua warga masyarakat Catalonia setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Dengan kalkulasi tersebutlah, Pemerintah Spanyol melakukan tindakan represi terhadap masyarakat yang akan melakukan demonstrasi dan pemungutan suara (Human Rights Watch, 2017) serta melakukan penangkapan terhadap Presiden Catalonia, Carles Puigdemont (Casey, 2021). Polisi dan aparat keamanan pun dikerahkan untuk memastikan stabilitas kondisi di seluruh Spanyol. Represifitas dan penangkapan terhadap pemimpin Catalonia yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol merupakan sebuah bukti konkret bahwa Pemerintah Spanyol melakukan kalkulasi sehingga konflik tersebut dapat mereda dan tidak meluas.

4.3 Studi Perbandingan Resolusi Konflik Pemerintah Spanyol dan Catalonia dengan Pemerintah Indonesia dan Aceh

Berbicara mengenai konflik antara daerah (Provinsi) dengan Pemerintah Pusat tentu tak asing pula bagi Indonesia. Gerakan separatisme begitu banyak bermunculan diawal-awal masa kemerdekaan. Akan tetapi, salah satu gerakan separatisme yang cukup dikenal luas adalah bagaimana gerakan separatisme Aceh terhadap Indonesia. Dalam artikel ini, periset berupaya untuk melakukan perbandingan antara Resolusi Konflik antara Spanyol dengan Catalonia dan Indonesia dengan Aceh. Periset menemukan bahwa terdapat beberapa kesamaan antara Aceh dengan Catalonia. Berstatus sebagai Provinsi pada negara masing-masing, Aceh dan Catalonia sama-sama tumbuh dengan pemikirannya sendiri. Dalam kasus ini, Aceh memiliki pandangan tersendiri mengenai pelaksanaan agama Islam dengan sepenuhnya serta penegakan hukum syariah. Aceh memegang teguh hukum-hukum syariah yang beberapa dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang di Indonesia. Dalam sejarahnya, Aceh memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Belanda serta berperan penting pula dalam perang mempertahankan kemerdekaan melawan tentara sekutu. Hal yang membuat Aceh mulai melakukan gerakan separatisme adalah ketika mereka mulai merasa adanya ketidakadilan perlakuan antar daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya pencabutan atas gelar “Daerah Istimewa” kepada Aceh. Hal tersebut menimbulkan rasa kekecewaan serta rasa dikhianati oleh para pejabat di Jakarta. Gerakan separatisme pun dilakukan dengan cara koersif yang dipimpin oleh gubernur pertama Aceh itu sendiri. Pemerintah Indonesia pun melakukan langkah perundingan untuk menyelesaikan konflik hingga pada akhirnya disetujui lah Undang-Undang baru yang memberikan Aceh keistimewaan dalam pengelolaan agama, adat, dan pendidikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak memuaskan sebagian besar masyarakat Aceh yang menganggap Aceh tidak diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Konflik pun semakin membesar ketika berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976. Konflik tersebut merenggut hingga 15.000 nyawa. Pemerintah pun berupaya untuk melakukan negosiasi, akan tetapi, dikarenakan tidak adanya kompromi selama negosiasi, Presiden Megawati kala itu memerintahkan operasi militer di Aceh yang menimbulkan korban jiwa hingga ribuan orang. Dinamika konflik berubah setelah

Tsunami pada tahun 2004 dimana GAM dan Pemerintah Indonesia setuju untuk mengakhiri konflik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin perundingan. Setelah melakukan 5 kali pertemuan, kedua belah pihak bersepakat terhadap revisi dan pembentukan undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh, pemebentukan partai politik lokal, kewenangan pengelolaan sumber daya yang lebih besar, dan pembebasan tahanan politik. Sejak disepakatinya perjanjian tersebut dan disahkannya Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh situasi lebih terkendali dan konflik pun mampu diredam (Lele, 2021).

Dari pandangan periset, setidaknya ada beberapa perbedaan antara konflik Spanyol dengan Catalonia dan Indonesia dengan Aceh. Dalam hal ini, (Mukti, Warsito, Surwandono, Badruzaman, & Pribadi, 2019) menjelaskan perbedaannya seperti yang ditunjukkan pada table di bawah.

Tabel 1. Perbedaan konflik Spanyol dengan Catalonia dan Indonesia dengan Aceh

Aspect	Aceh, Indonesia	Catalonia, Spain
Paradiplomacy management	- Organizing process - Paradiplomatic institutionalization: Board of International Cooperation - Regulations: Qonun 12/2013 National Law/Constitution: Number 11/2006 Helsinki Agreement, 2005 - Controlling political work and results: International network	- Organising process - Paradiplomatic institutionalization: Board of International affairs - Law/regulation: Spanish constitution amendment 2006 - Controlling political work and results: International network EU and others
Local Political movement	Free Aceh movement and supporting elements (partai aceh/aceh party established by CAM activist)	Pro catalonia independence (junts per catalunya/together for catalonia, formed and led by puigdemont)

Dari pelaksanaan perundingan, baik Aceh maupun Catalonia sama-sama menggunakan unsur paradiplomasi dalam menggalang dukungan internasional untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan disini adalah bagaimana Pemerintah Spanyol belum melakukan amandemen dengan pembahasan yang lebih konkrit sehingga pasca amandemen Undang-Undang pada tahun 2006, konflik pada tahun 2017 tetaplah terjadi dan narasi mengenai Catalonia yang masih ingin merdeka masih terus berkembang hingga saat ini. Sementara, meski Indonesia sempat memberlakukan operasi militer di Aceh, Indonesia menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur perundingan sehingga mencapai kesepakatan dan Wilayah Aceh pun menjadi lebih stabil.

5. KESIMPULAN

Konflik Spanyol dan Catalonia merupakan sebuah konflik panjang yang terjadi secara terus menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Konflik yang bermula dari perbedaan budaya ini pun meluas hingga menjadi masalah politik, ekonomi, dan sosial. Konflik pun semakin berkembang meluas ketika Pemerintah Catalonia mendorong adanya perubahan atau amandemen Konstitusi Spanyol pada tahun 2006. Hal ini kemudian meluas menjadi gerakan upaya separatisme pada 2017 melalui gerakan referendum Catalonia pada tahun 2017 yang dipimpin oleh carles Puigdemont. Dalam menyelesaikan dua masalah tersebut, Pemerintah Spanyol menggunakan 2 pendekatan yang

berbeda. Dalam menyelesaikan konflik amandemen konstitusi Spanyol terhadap Catalonia pada tahun 2006, Pemerintah Spanyol menggunakan pendekatan dengan melihat kepada dinamika konflik yang ditunjukkan dengan Pemerintah Spanyol yang menempatkan diri berada di seberang kubu Pemerintah dan Masyarakat Catalonia.

Pemerintah Spanyol berupaya untuk melawan gerakan separatist Catalonia. Dinamika konflik yang terjadi juga membuat adanya proteksi yaitu penunjukkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam menghadapi konflik yang terjadi. Selain itu, konflik pada tahun 2006 juga dapat dilihat melalui *game theory* yang menggambarkan konflik Spanyol dan Catalonia dengan berbagai situasi hingga tercapainya suatu resolusi atas masalah tersebut. Dalam kasus konflik pada tahun 2006, Pemerintah Spanyol memilih untuk melunak dan menyetujui berbagai usulan yang diberikan oleh Catalonia mengenai amandemen konstitusi Spanyol tersebut. Namun, dalam menyelesaikan konflik pada tahun 2017, Pemerintah Spanyol menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu teknik “penghitungan rasional” yaitu sebuah teknik pendekatan dalam resolusi konflik yang menggunakan perhitungan dengan memperhatikan apa yang musuh miliki dan apa yang musuh sudah lakukan. Dalam pendekatan ini aktor didorong untuk berpikir secara rasional dengan membentuk penilaian mereka sendiri dimana dari pemikiran tersebut akan tercapai sebuah keputusan maupun strategi untuk menghadapi konflik yang sedang terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan represi aparat yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum di Pemerintah Spanyol karena mengetahui partisipasi atau dukungan publik atas tindakan separatisme tersebut tidak cukup tinggi yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi dalam pemungutan suara referendum yang hanya 43%. Selain itu, masalah konflik antara pemerintah pusat dan daerah juga pernah terjadi di Indonesia tepatnya antara Aceh dengan Indonesia. Terdapat beberapa kesamaan atas konflik tersebut, diantaranya adalah kesamaan konflik yang merupakan konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan tetapi terdapat sebuah perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya yaitu adalah Konflik Aceh-Indonesia berhasil diselesaikan melalui sebuah perjanjian sehingga dapat diselesaikannya konflik tersebut melalui dialog perdamaian meski sempat diawali dengan sebuah operasi militer.

Saran dari periset atas hasil riset ini adalah Catalonia seharusnya melakukan pendekatan yang dilakukan oleh Aceh yaitu menggali dukungan internasional untuk mendorong Pemerintah Spanyol meneken perjanjian tertentu. Selain itu, Catalonia tidak perlu melakukan dorongan atas tindakan separatisme dengan mendirikan negara sendiri. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi pergerakan Catalonia itu sendiri apalagi ketika Catalonia belum mengantongi dukungan internasional yang cukup kuat. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi dan melakukan penandatanganan semacam nota kesepahaman yang berisikan jalan tengah dari kedua belah pihak agar supaya konflik tersebut dapat diselesaikan dan penyelesaian konflik tersebut dapat berlangsung lama.

REFERENSI

- Adhinata, M. B. (2018). Separatisme Catalan: Symbolization of FC Barcelona, Nationalism and Political Identity. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7-12.
- Anderson, P. (2020). Decentralisation at a Crossroads: Spain, Catalonia and the Territorial Crisis . *Ethnopolitics*, 1-14.
- Antara News. (2017). *Indonesia Tidak Akui Kemerdekaan Catalonia*. Retrieved from <https://www.antarane.ws.com/berita/661390/indonesia-tidak-akui-kemerdekaan-catalonia>
- Bercovitch, J., Kremenjuk, V., & Zartman, W. (2008). *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*. London: SAGE Publications.

- Binmore, K. (2007). *Game Theory: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods: 4th Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Casey, N. (2021). *Catalan Separatist Leader, Carles Puigdemont, Is Arrested in Italy*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2021/09/23/world/europe/puigdemont-arrested-catalonia-spain-italy.html>
- Cetra, D., Adam, E. C., & Tarrega, M. (2018). The 2017 Catalan Independence Referendum: A Symposium. *Scottish Affairs*, 126-143.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: Fifth Edition*. SAGE Publications.
- Dearden, L. (2017). *Catalan independence referendum illegal under Spanish constitution, European Commission confirms*. Retrieved from <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/catalan-independence-referendum-not-legal-spanish-constitution-european-commission-juncker-spain-law-a7978386.html>
- Dermawan, W., & Akim. (2020). Catalan Identity and Paradiplomacy Strategy in Catalonia's Independence Movement. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 317-337.
- Esteller-Moré, A., & Rizzo, L. (2021). The Economic Costs of a Secessionist Conflict: The Case of Catalonia. *Defence and Peace Economics*.
- Holesch, A., & Jordana, J. (2021). The politics of unilateral secession in the European Union: the case of Catalonia. *Territory, Politics, Governance*.
- Human Rights Watch. (2017). *Spain: Police Used Excessive Force in Catalonia*. Retrieved from [www.hrw.org](https://www.hrw.org/news/2017/10/12/spain-police-used-excessive-force-catalonia): <https://www.hrw.org/news/2017/10/12/spain-police-used-excessive-force-catalonia>
- Irene, D., & Mansur. (2019). Analisis Kegagalan Referendum Catalunya Tahun 2006-2017. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*.
- Jeong, H.-W. (2010). *Conflict management and resolution : an introduction*. Routledge.
- Lele, G. (2021). Asymmetric Decentralization, Accommodation and Separatist Conflict: Lessons From Aceh and Papua, Indonesia. *Territory, Politics, Governance*.
- Miley, T. J., & Garvia, R. (2019). Conflict in Catalonia: A Sociological Approximation. *Genealogy*, 1-27.
- Miro, J. (2020). The Tensions of Populism in Power: A Discursive Theoretical Analysis of the Catalan Secessionist Push (2006-2017). *Distinktion: Journal of Social Theory*.
- Mukti, T. A., Warsito, T., Surwandono, Badruzaman, I., & Pribadi, U. (2019). Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain. *European Journal of East Asian Studies*, 66-92.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oner, S. (2019). The Relations Between Catalonia and The European Union and Catalan Independence Referendum. *Marmara Journal of European Studies*, 29-49.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rapoport, A. (1974). *Game Theory as a Theory of Conflict Resolution*. Dordrecht: Springer.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tzagkas, C. A. (2018). The Internal Conflict in Spain: The case of Catalonia. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Sciences*, 58-63.
- Wallenstein, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution*. London: Sage Publications.